

Received	: 5 Oktober 2020
Revised	: 12 Desember 2020
Accepted	: 29 Desember 2020
Published	: 29 Desember 2020

The Dynamics of the Codification of Indonesian Post-Publication Republic of Indonesia Government Regulation Number 57 Year 2014

Sudaryanto^{1,a)}, Pratomo Widodo²

^{1,2}Ilmu Pendidikan Bahasa, Program Pascasarjana,
Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
E-mail: ^{a)}sudaryanto@pbsi.uad.ac.id

Abstract

The issuance of Government Regulation of the Republic of Indonesia (PP) Number 57 of 2014 concerning Development, Development and Protection of Language and Literature, as well as Improvement of the Function of Indonesian Language has made the dynamics of the Indonesian codification even more current. Before the regulation was published, the Indonesian language codification conducted by the government was limited to publishing the Big Indonesian Dictionary IV (KBBI) IV, General Guidelines for the Formation of Terms (PUPI), and General Guidelines for Improved Indonesian Spelling (PUEYD). The research method used is descriptive qualitative method. The data collection methods and techniques used include the listening method, with the basic tapping techniques and the advanced, competent free listening (SBLC) techniques. Meanwhile, the data analysis methods and techniques used include the orthographic equivalent method, with the basic technique of determining the deciding element (PUP) and the advanced comparative relationship technique equalizing the subject matter (HBSP). The results showed that the codification of Indonesian language after the issuance of PP Number 57 Year 2014 included updating the KBBI, PUPI Workshops, and publishing a number of bilingual dictionaries (Indonesian-regional languages).

Keywords: codification of language, Indonesian, PP Number 57 of 2014

Abstrak

Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia membuat dinamika kodifikasi bahasa Indonesia kian mutakhir. Sebelum peraturan itu terbit, kodifikasi bahasa Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah baru sebatas menerbitkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) IV, Pedoman Umum Pembentukan Istilah (PUPI), dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (PUEYD). Metode penelitian yang digunakan adalah

metode kualitatif deskriptif. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup metode simak, dengan teknik dasar sadap dan teknik lanjutan simak bebas libat cakap (SBLC). Sementara itu, metode dan teknik analisis data yang digunakan mencakup metode padan ortografis, dengan teknik dasar pilah unsur penentu (PUP) dan teknik lanjutan hubung banding menyamakan hal pokok (HBSP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kodifikasi bahasa Indonesia pascaterbitnya PP Nomor 57 Tahun 2014 meliputi pemutakhiran KBBI, Lokakarya PUPI, dan penerbitan sejumlah kamus dwibahasa (bahasa Indonesia-bahasa daerah).

Kata kunci: kodifikasi bahasa, bahasa Indonesia, PP Nomor 57 Tahun 2014

PENDAHULUAN

Bahasa Indonesia telah resmi memiliki politik bahasa nasional. Yang dimaksudkan dengan “politik bahasa nasional” itu ialah prinsip-prinsip dan langkah-langkah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bahasa yang dirumuskan sesuai dengan kepentingan nasional suatu negara. Terkait itu, politik bahasa biasanya disebarluaskan dalam bentuk undang-undang atau peraturan lain yang eksplisit dan mengikat (Kridalaksana, 2011).

Sudaryanto, dkk. (2019a) menambahkan bahwa politik bahasa nasional muncul setelah adanya Praseminar Politik Bahasa Nasional tahun 1974 dan Seminar Politik Bahasa Nasional tahun 1975. Kemudian dilanjutkan lagi Seminar Politik Bahasa tahun 1999 dan Seminar Politik Bahasa 2015.

Salah satu peraturan terkait politik bahasa nasional ialah Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Peraturan itu ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 7 Juli 2014. Di dalam Pasal 11 ayat (2) PP Nomor 57 Tahun 2014 dijelaskan pengembangan bahasa Indonesia dilakukan melalui: (a) penelitian kebahasaan, (b) pengayaan kosakata, (c) pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa, (d) penyusunan bahan ajar, (e) penyusunan alat uji kemahiran berbahasa, (f) penerjemahan, dan (g) publikasi hasil pengembangan bahasa Indonesia. Secara tidak langsung, terbitnya PP Nomor 57 Tahun 2014 itu membuat kodifikasi bahasa Indonesia kian mutakhir. Pertanyaannya kini, apa dan bagaimana kodifikasi bahasa Indonesia itu dilaksanakan pascaterbitnya PP Nomor 57 Tahun 2014?

Kridalaksana (2011) mendefinisikan kodifikasi ialah proses pencatatan norma-norma yang telah dihasilkan oleh proses standardisasi, dalam bentuk buku tata bahasa, pedoman lafal, pedoman ejaan, pedoman istilah, atau kamus. Kodifikasi penting diberi perhatian saksama. Sementara itu, penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V mendefinisikan kodifikasi ialah pencatatan norma yang telah dihasilkan oleh pembakuan dalam bentuk buku tata bahasa, seperti pedoman lafal, pedoman ejaan, pedoman pembentukan istilah, atau kamus. Definisi Kridalaksana dan KBBI V sedikit banyak memiliki kemiripan sehingga masyarakat Indonesia mudah memahami apa kodifikasi itu. Berikutnya, bagaimana kodifikasi bahasa Indonesia itu dilaksanakan pascaterbitnya PP Nomor 57 Tahun 2014 belum banyak diamati oleh pengajar dan

peneliti bahasa Indonesia, dan oleh karenanya, tulisan ini akan fokus ke arah masalah itu.

Sejauh ini, sejumlah kajian tentang bahasa Indonesia, terutama perihal fungsi dan kedudukannya, serta pembinaan dan pengembangannya sudah terbit, seperti Assapari (2014), Aziz (2014), Sartini (2014), Rahayu (2015), Sihombing, dkk. (2017), Sudrama & Yadnya (2017), Mulyana (2018), Wijana (2018), Sudaryanto, dkk. (2019b), dan Sudaryanto, dkk. (2019c). Di antara sepuluh kajian itu, hanya Wijana (2018) yang mengulas pengembangan bahasa Indonesia. Namun, kajian tersebut juga tidak berfokus ke arah kodifikasi bahasa Indonesia secara khusus. Wijana (2018) lebih banyak menyoroiti perihal keberhasilan bangsa Indonesia mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa nasional. Namun, keberhasilan itu ternyata tidak didukung oleh sikap positif para penutur bahasa Indonesia untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa nasionalnya.

Untuk itulah, kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika kodifikasi bahasa Indonesia pascaterbitnya PP Nomor 57 Tahun 2014. Sebelum peraturan itu terbit, kodifikasi bahasa Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah baru sebatas menerbitkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) IV, Pedoman Umum Pembentukan Istilah (PUI), dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (PUEYD). Setelah aturan PP Nomor 57 Tahun 2014 terbit, kodifikasi bahasa Indonesia mengalami pemutakhiran, salah satunya ialah terbit KBBI V dalam dua bentuk, yaitu KBBI V versi luring (*offline*) dan versi daring (*online*).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup metode simak, dengan teknik dasar sadap dan teknik lanjutan simak bebas libat cakap (SBLC) (Mahsun, 2019). Data yang dikumpulkan berupa data pengembangan bahasa dari tahun 2014 hingga tahun 2017 yang tertera di buku agenda Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara itu, metode dan teknik analisis data yang digunakan mencakup metode padan ortografis, dengan teknik dasar pilah unsur penentu (PUP) dan teknik lanjutan hubung banding menyamakan hal pokok (HBSP) (Mahsun, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

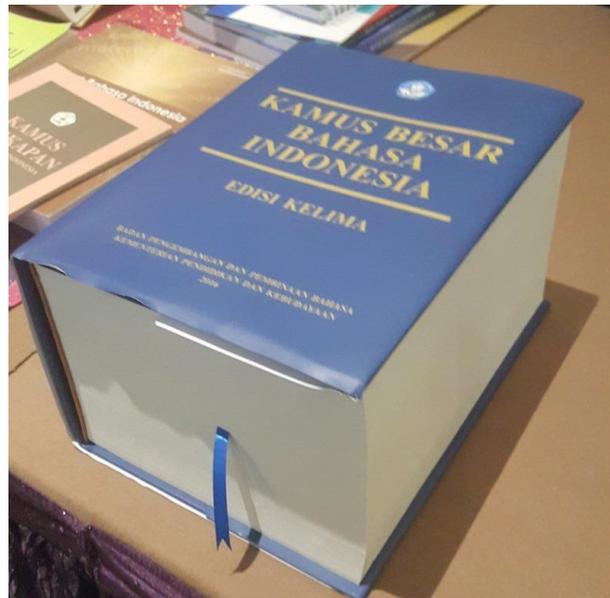
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kodifikasi bahasa Indonesia pascaterbitnya PP Nomor 57 Tahun 2014 meliputi pemutakhiran KBBI, Lokakarya PUI, dan penerbitan sejumlah kamus dwibahasa (bahasa Indonesia-bahasa daerah). Perihal pemutakhiran KBBI, Lokakarya PUI, dan penerbitan sejumlah kamus dwibahasa (bahasa Indonesia-bahasa daerah) dibahas di bawah ini, serta dilengkapi dengan sejumlah gambar yang relevan. Seperti didefinisikan Kridalaksana (2011) dan

KBBI V (2016), KBBI, PUI, dan kamus dwibahasa merupakan bentuk dari kodifikasi bahasa Indonesia yang dilakukan pascaterbitnya PP Nomor 57 Tahun 2014.

Pemutakhiran KBBI (2016—2018)

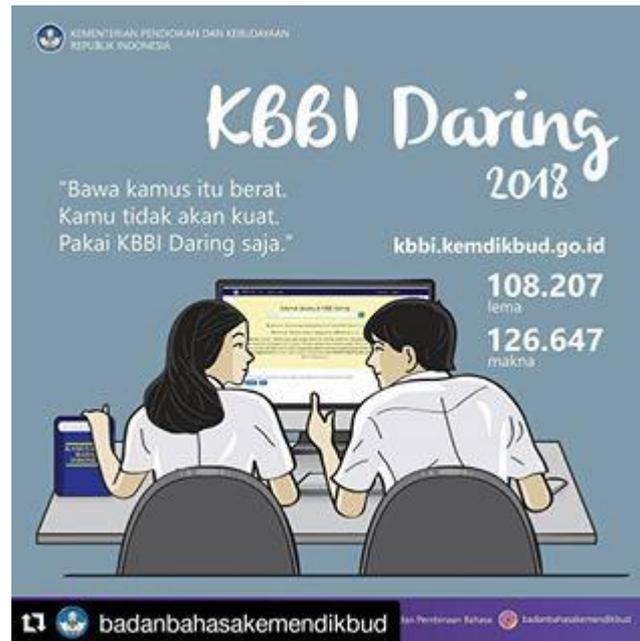
Ditinjau dari sejarah penyusunannya, KBBI I terbit pada tahun 1988 dengan memuat 62.000 entri, KBBI II terbit pada tahun 1991 dengan memuat 72.000 entri, KBBI III terbit pada tahun 2000 dengan memuat 78.000 entri, KBBI IV terbit pada tahun 2008 dengan memuat 78.000 entri, dan KBBI V terbit pada tahun 2016 dengan memuat 110.538 entri (data per April 2019). Dalam penyusunannya, pihak penyusun KBBI tentu merujuk ke beberapa sumber awal KBBI, di antaranya:

1. *Kamus Indonesia* oleh E. St. Harahap (1942),
2. *Kamus Modern Bahasa Indonesia* oleh Sutan Mohammad Zain (1951),
3. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* oleh W. J. S. Poerwadarminta (1953), dan
4. *Kamus Bahasa Indonesia* oleh Pusat Bahasa (1983)



Gambar 1. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima* (2016)

KBBI V berbeda dengan KBBI edisi-edisi sebelumnya. KBBI V terbit dalam dua versi, yaitu KBBI V Cetak dan KBBI V Daring. Gambar 1 merupakan KBBI V versi cetak. Sementara itu, KBBI V Daring dapat diakses melalui laman kbbi.kemdikbud.go.id. Dalam rangka sosialisasi KBBI V Daring, pihak Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) mengkreasikan kata-kata khas tokoh Dilan dalam film "Dilan 1990" menjadi "Bawa kamus itu berat. Kamu tidak akan kuat. Pakai KBBI Daring saja." (Gambar 2). Selain itu, ada pula informasi bahwa di KBBI Daring memuat 108.207 buah lema dan 126.647 buah makna.



Gambar 2. Infografis KBBI Daring 2018

Para pengguna gawai dapat pula mengakses aplikasi KBBI V (Gambar 3). Aplikasi KBBI V adalah aplikasi luring resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk pencarian kata, frasa, dan ungkapan dalam KBBI Edisi Kelima (KBBI V). Aplikasi itu dalam bentuk versi 0.3.2 Beta, dimutakhirkan pada tanggal 18 Desember 2019, diunduh oleh 1.000.000 pengunduh, dan dirilis pada tanggal 27 Oktober 2016. Aplikasi KBBI V memiliki rating sebanyak 4,7 poin dan tingkat ulasan mencapai 17.367 buah. Dengan demikian, aplikasi luring KBBI V dapat dipercaya dan diandalkan guna membantu pemahaman masyarakat Indonesia terhadap kata, frasa, dan ungkapan dalam bahasa Indonesia mutakhir.



Gambar 3. Logo Aplikasi Luring KBBI Edisi V

Terkait itu, peluncuran KBBI Edisi V Cetak dan Daring diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (saat itu) Muhadjir Effendy didampingi oleh Kepala Badan

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Dadang Sunendar bersamaan momentum Hari Sumpah Pemuda pada tahun 2016 di Jakarta. Dua tahun berikutnya, pihak Badan Bahasa mengadakan Lokakarya Pemutakhiran Kamus Besar Bahasa Indonesia pada bulan April 2018. Salah satu pembicara di dalam lokakarya itu adalah Drs. Abdul Gaffar Ruskhan, M.Hum. (paling kanan di Gambar 4).



Gambar 4. Lokakarya Pemutakhiran Kamus Besar Bahasa Indonesia

Lokakarya PUPI (2018)

Pedoman Umum Pembentukan Istilah (disingkat PUPI) disusun berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146/U/2004 tentang Penyempurnaan Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Aturan Mendiknas itu menetapkan satu hal, yaitu menyempurnakan *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0389/U/1988. PUPI telah terbit sebanyak tiga edisi dan tiap-tiap edisi memiliki cetakan tahun yang berbeda. PUPI edisi pertama terbit pada tahun 1975 dan 1988. PUPI edisi kedua terbit pada tahun 1989, 1992, 1997, dan 2000. PUPI edisi ketiga terbit pada tahun 2004, 2005, 2006, dan 2007. PUPI edisi keempat belum terbit.

Tahun 2018 sempat diselenggarakan Lokakarya PUPI pada 9—12 April di Hotel Onih, Bogor, Jawa Barat. Saat itu, penulis juga mendapatkan undangan sebagai narasumber terpilih setelah mengirimkan naskah esai dan dinyatakan lolos. Selain penulis, ada pula lima orang lainnya yang terpilih sebagai narasumber terpilih, yaitu Faizal Hadi Nugroho (guru di Malang), Tendy K. Somantri (editor dan pengajar di Bandung), Titi Sukarti (guru di Depok), Asep Rahmad Hidayat (PNS di Bandung), dan Muhardis (PNS di Jakarta).

Pihak Badan Bahasa memiliki tujuan dari lokakarya itu agar setiap istilah yang masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia, baik dari bahasa asing maupun dari bahasa daerah, jelas kaidahnya. Adapun topik-topik tulisan yang berkenaan dengan pemutakhiran PUPI sebagai berikut.

1. Pemandangan, penerjemahan, dan penulisan unsur serapan dari bahasa daerah (Jawa, Minang, Melayu Jakarta, Sunda, Madura, Bali, Aceh, Banjar, Muna, dan Batak);
2. Pemandangan, penerjemahan, dan penulisan unsur serapan dari bahasa asing (Jepang, Korea, Sanskerta, Cina, Italia, Jerman, dan Spanyol);
3. Aspek semantik peristilahan; dan
4. Aspek tata bahasa peristilahan.

Selain narasumber terpilih, ada pula peserta terpilih dalam Lokakarya PUPI tahun 2018, sebagaimana tertulis di dalam tabel berikut ini.

No.	Nama	Profesi	Asal
1.	Gunawan Widiyanto	Widyaiswara	Depok
2.	Ganjar Harimansyah	PNS	Jakarta
3.	Suladi	PNS	Jakarta
4.	Degita Danur Suharsono	Pengajar	Jember
5.	Nila Kencana	Dosen	Bengkulu
6.	Zakaria	Wiraswasta	Kediri
7.	Noprival	Dosen	Depok
8.	Ahmad Fadly	Dosen	Jakarta
9.	Ayuninda Erdiani	Mahasiswa	Bantul
10.	Nurmawati	Pengajar	Mataram
11.	Yani Suryani	Dosen	Bandung
12.	Ovi Soviaty	PNS	Jakarta
13.	Azhari Dasman Darnis	PNS	Jakarta
14.	Ahmad Suyuti	Mahasiswa	Sleman
15.	Ardi Wina Saputra	Sarjana Pendidikan	Malang
16.	Syihaabul Hudaa	Dosen	Jakarta
17.	Yoli Hemdi	Penulis	Bogor
18.	Yoga Prasetya	Guru	Situbondo
19.	Haira Rizka	Dosen	Cirebon
20.	Zarkasi	PNS	Jakarta
21.	Andi Faisa	PNS	Jakarta
22.	Umi Kulsum	PNS	Bandung
23.	Sudadi	Guru	Wonosobo
24.	Yoga Yolanda	Mahasiswa	Jember
25.	Solihin Rosyidi	Editor	Bogor
26.	Muhammad Ridwan	Dosen	Yogyakarta
27.	Evi Fitriyani	Mahasiswa	Bogor
28.	Nuryani	Dosen	Tangerang
29.	Fifik Saifudin	PNS	Jakarta
30.	Mila Setyowati	Mahasiswa	Jakarta

Penerbitan Kamus Dwibahasa dan Multibahasa (2014—2017)

Salah satu bentuk kodifikasi bahasa Indonesia yang sifatnya dinamis ialah penerbitan kamus dwibahasa (bahasa Indonesia-bahasa daerah) dan kamus multibahasa (bahasa Indonesia-bahasa daerah-bahasa asing). Pasca-terbitnya PP Nomor 57 Tahun 2014, penerbitan kamus dwibahasa dan kamus multibahasa oleh Badan Bahasa tetap berjalan. Ada kamus dwibahasa dan kamus multibahasa yang sudah terbit, dan ada pula kamus dwibahasa dan kamus multibahasa yang sedang proses penerbitan. Tabel di bawah ini berisikan kamus-kamus dwibahasa dan kamus multibahasa yang terbit dari tahun 2014 hingga tahun 2017.

Kamus Dwibahasa dan Multibahasa (2014—2017)

No.	Judul Kamus	Keterangan
1.	<i>Kamus Bahasa Alune-Bahasa Indonesia</i>	Terbit 2014
2.	<i>Kamus Bahasa Dayak Banuaq-Bahasa Indonesia</i>	Proses
3.	<i>Kamus Bahasa Jawa Banten-Bahasa Indonesia</i>	Proses
4.	<i>Kamus Bahasa Jawa Banyumasan-Bahasa Indonesia</i>	Proses
5.	<i>Kamus Bahasa Jawa Tegal-Bahasa Indonesia</i>	Proses
6.	<i>Kamus Bahasa Lamboya Kabupaten Sumba Barat</i>	Proses
7.	<i>Kamus Bahasa Lisabata-Bahasa Indonesia</i>	Terbit 2014
8.	<i>Kamus Bahasa Lolina-Bahasa Indonesia</i>	Proses
9.	<i>Kamus Bahasa Makassar-Bahasa Indonesia</i>	Proses
10.	<i>Kamus Bahasa Melayu Palembang-Bahasa Indonesia</i>	Terbit 2014
11.	<i>Kamus Bahasa Melayu Sumatera Utara</i>	Proses
12.	<i>Kamus Bahasa Moi-Bahasa Indonesia</i>	Proses
13.	<i>Kamus Bahasa Paser-Bahasa Indonesia</i>	Terbit 2014
14.	<i>Kamus Bahasa Salas-Bahasa Indonesia</i>	Terbit 2014
15.	<i>Kamus Urban</i>	Terbit
16.	<i>Kamus Pemelajar</i>	Terbit
17.	<i>Kamus Besar Bahasa Indonesia VI</i>	Terbit 2016
18.	<i>Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Sunda Cirebon</i>	Terbit
19.	<i>Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Sunda</i>	Terbit
20.	<i>Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Saloan</i>	Terbit
21.	<i>Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Melayu Kampar</i>	Terbit
22.	<i>Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Gresi (Papua)</i>	Terbit
23.	<i>Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Dayak Lawangan</i>	Terbit
24.	<i>Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Dayak Halong</i>	Terbit
25.	<i>Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Osing</i>	Terbit
26.	<i>Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Meibrat</i>	Terbit
27.	<i>Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Madura</i>	Terbit
28.	<i>Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Gorap (Maluku Utara)</i>	Terbit
29.	<i>Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Dayak Deah Edisi I</i>	Terbit
30.	<i>Sundanese English Dictionary</i>	Terbit
31.	<i>Kosakata Bahasa Teiwa-Bahasa Indonesia-Bahasa Inggris</i>	Terbit
32.	<i>Kamus Ungkapan Bahasa Minangkabau</i>	Terbit
33.	<i>Kamus Umum Basa Sunda</i>	Terbit

34.	<i>Kamus Praktis Jawa-Indonesia untuk SD/MI</i>	Terbit
35.	<i>Kamus Pengantar Bahasa Kupang</i>	Terbit
36.	<i>Kamus Pengantar Bahasa Kamang-Indonesia-Inggris</i>	Terbit
37.	<i>Kamus Makanan Tradisional Jawa Barat</i>	Terbit
38.	<i>Kamus Kosakata Budaya Jambi Edisi II</i>	Terbit
39.	<i>Kamus Etimologi Basa Sunda</i>	Terbit
40.	<i>Kamus Budaya Sulawesi Tenggara Edisi 2</i>	Terbit
41.	<i>Kamus Budaya Baduy</i>	Terbit
42.	<i>Kamus Basa Sunda-Indonesia</i>	Terbit
43.	<i>Kamus Bahasa Urban</i>	Terbit
44.	<i>Kamus Bahasa Sunda-Inggris</i>	Terbit
45.	<i>Kamus Bahasa Sunda-Indonesia (Jabar)</i>	Terbit

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikatakan bahwa usaha kodifikasi bahasa Indonesia berupa penerbitan kamus dwibahasa dan kamus multibahasa oleh Badan Bahasa tetap berjalan pasca-terbitnya PP Nomor 57 Tahun 2014. Kamus dwibahasa dan kamus multibahasa itu menjadi produk kebahasaan yang digunakan untuk melakukan pengembangan bahasa Indonesia, sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) butir c, yaitu “Pengembangan Bahasa Indonesia dilakukan melalui pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa.”

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pertama, telah terbit PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Peraturan itu merupakan produk hukum turunan dari Pasal 40 UU Nomor 24 Tahun 2009. Kedua, pengembangan bahasa Indonesia, sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) butir c PP Nomor 57 Tahun 2014, yaitu “Pengembangan Bahasa Indonesia dilakukan melalui pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa.” Ketiga, kodifikasi bahasa Indonesia yang dilakukan oleh Badan Bahasa pasca-terbitnya PP Nomor 57 Tahun 2014 ialah pemutakhiran KBBI, Lokakarya PUI, dan penerbitan kamus dwibahasa dan kamus multibahasa.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah membantu dalam pelaksanaan penelitian dan menyusun artikel ini.

REFERENSI

- Assapari, M. M. (2014). Eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan perkembangannya di era globalisasi. *Prasi*, 9(18): 29—37. doi: <http://dx.doi.org/10.23887/prasi.v9i18.8943>.
- Aziz, A. L. (2014). Penguatan identitas bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional dan bahasa persatuan jelang penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. *Jurnal Studi Sosial*, 6(1): 14—20.
- Kridalaksana, H. (2011). *Kamus Linguistik Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahsun (2019). *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan, Strategi, Metode, dan Tekniknya Edisi Ketiga*. Depok: Rajawali Pers.
- Mulyana, A. T. (2018). Isu-isu kritis kebijakan bahasa dan pengajaran bahasa. *Biomatika: Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 4(01): 1—7.
- Rahayu, A. P. (2015). Menumbuhkan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pendidikan dan pengajaran. *Jurnal Paradigma*, 2(1): 1—15.
- Sartini, N. W. (2014). Revitalisasi bahasa Indonesia dalam konteks kebahasaan. *Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, 27(4): 206—210. doi: <http://dx.doi.org/10.20473/mkp.V27I42014.206-210>.
- Sihombing, R., Wisnaeni, F., & Saraswati, R. (2017). Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Studi penggunaan bahasa Indonesia di bangunan gedung fungsi usaha yang ada di Kota Semarang). *Diponegoro Law Journal*, 6(2): 1—10.
- Sudaryanto, S., Soeparno, S., & Ferawati, L. (2019a). Politics of language in Indonesia: Study of history and language policy. *Aksis: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 3(1): 129—139. doi: <https://doi.org/10.21009/AKSIS.030113>.
- Sudaryanto, S., Lestari, A. T., & Anggita, F. D. (2019b). Pembinaan bahasa Indonesia: Bagaimana strateginya di era digital? *Jurnalistrendi: Jurnal Linguistik, Sastra, dan Pendidikan*, 4(1): 269—278.
- Sudaryanto, S., Hermanto, H., & Gustiani, E. I. (2019c). Media sosial sebagai sarana pembinaan bahasa Indonesia di era digital. *Kode: Jurnal Bahasa*, 8(4): 61—74. doi: <https://doi.org/10.24114/kjb.v8i4.16005>.
- Sudrama, K. & Yadnya, I. B. P. (2017). Dilema multilingualisme dan implikasinya terhadap perencanaan bahasa. *Retorika: Jurnal Ilmu Bahasa*, 1(1): 94—107. doi: <https://doi.org/10.22225/jr.1.1.15.94-107>.

Wijana, I. D. P. (2018). Pemertahanan dan pengembangan bahasa Indonesia. *Widyaparwa*, 46(1): 91—98. Doi: <https://doi.org/10.26499/wdprw.v46i1.166>.